

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



## Terima LKPP Tahun 2023 *Unaudited*, BPK Minta Pemerintah Terus Lakukan Peningkatan Kualitas APBN

**Jakarta, Kamis (28 Maret 2024)** – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 (*unaudited*) dalam kegiatan *Entry Meeting* Pemeriksaan LKPP Tahun 2023 di Kantor Pusat BPK pada Kamis (28/03). BPK meminta pemerintah terus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pengalokasian dan pelaksanaan APBN, sehingga kualitas LKPP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat diikuti dengan kualitas pencapaian hasil-hasil pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Hal tersebut dinyatakan oleh Ketua BPK **Isma Yatun** dalam kegiatan *entry meeting* yang dihadiri para Anggota BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara, Menteri Keuangan **Sri Mulyani**, dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya.

Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan kecukupan pengungkapan. “Untuk memberikan keyakinan memadai, BPK akan melaksanakan serangkaian prosedur pemeriksaan berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian risiko, yang didukung dengan pemanfaatan *Big Data Analytic*. Hasil pemeriksaan LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai sejauh mana APBN digunakan untuk mendukung pencapaian rencana pembangunan dan tujuan bernegara,” papar Isma Yatun.

Dalam melakukan identifikasi dan penilaian risiko, BPK mempertimbangkan antara lain penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya; hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan BPK di tahun 2023 yang terkait dengan pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan tahun 2023; dan berbagai kebijakan yang dilaksanakan selama tahun 2023, antara lain pembentukan Bagian Anggaran atau entitas pelaporan baru di tahun 2023, serta penerapan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran sebagai pengganti mekanisme penggunaan Bank Garansi.

Sementara itu, Anggota II BPK **Daniel Lumban Tobing** menyampaikan, pada pemeriksaan LKPP Tahun 2023, BPK akan memfokuskan pemeriksaan antara lain pada belanja negara, pendapatan negara, investasi pemerintah, dan utang pemerintah. Agar pemeriksaan LKPP Tahun 2023 dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan, BPK berharap jajaran pemerintah untuk memberi dukungan optimal dalam penyediaan data, dokumen, dan informasi yang dibutuhkan dalam pemeriksaan.

Daniel menambahkan, informasi keuangan yang disajikan perlu dilengkapi dengan informasi capaian kinerja Pemerintah yang menggambarkan sejauh mana dana APBN dapat bermanfaat untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan sehingga bermanfaat bagi masyarakat. “Untuk itu, penting bagi Pemerintah segera mendesain infrastruktur atau *support system* yang memadai untuk mengintegrasikan pelaporan informasi keuangan dengan pelaporan informasi kinerja Pemerintah,” jelasnya.

Mewakili Pemerintah, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan komitmen, apresiasi, dan harapannya, agar komunikasi dan kerja sama yang efektif antara pemerintah dan BPK dapat terus dipertahankan. Pemerintah telah melaksanakan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi BPK dan memonitor perkembangannya agar secara komprehensif dapat menyelesaikan poin permasalahan.

**Biro Humas dan Kerja Sama Internasional**

**Informasi lebih lanjut:** R. Yudi Ramdan, Kepala Biro Humas dan KSI  
Telp. 021 25549000 Ext. 1184/1188, Email : [publikasimedia@bpk.go.id](mailto:publikasimedia@bpk.go.id)



bpkri



bpkriofficial



BPK RI Official